

ISSN 2085-7144



# JURNAL ILMU PENDIDIKAN (JIP) STKIP KUSUMA NEGARA


Volume : 11/Th.VII/2014 (Juni - Desember 2014)



**PUSAT PENELITIAN STKIP KUSUMA NEGARA**  
Jl. Raya Bogor Km. 24 Cijantung, Pasar Rebo  
Jakarta Timur 13770  
Telp./Fax. (021) 87791773

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIVE LEARNING MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR PKN PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI TERBUKA DALAM BERBAGAI SISTIM PEMERINTAHAN (Oleh : Sunarti, S.Pd).....	1-16
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI MORAL DAN BUDI PEKERTI (Oleh : Dr. Julien Biringan, M.Si) .....	17-26
KONSEP DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM SEKOLAH (Oleh : Neng Nurwatiin, M.Pd).....	27-34
MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING (BERMAIN PERAN) DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR KEWIRAUSAHAAN DALAM PRAKTEK USAHA KECIL (Oleh : Drs. H. Memet Farajnuri, MM).....	35-52
FACTORS INFLUENCING EDUCATION AND WORK OF BROKEN CHLID GONE TO SCHOOL IN DISTRICT of TOWN SOUTH SARMENTOSE BITUNG (Oleh : Dr. Alfien Pandaleke, M.Si).....	53-62
PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA DI BANDUNG RAYA (Oleh : Masta Hutajulu, M.Pd).....	63-70
PENGARUH HUBUNGAN INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA ANGGOTA SATRESNARKOBA POLRES METRO JAKARTA BARAT (Oleh : Ratna Quratul Ainy, Novi Indah Earlyanti).....	71-82
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR KEWIRAUSAHAAN MELALUI METODA CTL (COOPERATIF TEACHING AND LEARNING) PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 10 JAKARTA (Oleh : Drs. Daryono).....	83-92
PERANAN BIMBINGAN KONSELING DALAM MENYELESAIKAN KASUS SALAH MEMILIH JURUSAN DENGAN TEORI PENDEKATAN BEHAVIOURISTIK (Oleh : Dra. Hermi).....	93-112



## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI MORAL DAN BUDI PEKERTI

**Julien Biringan**  
Dosen UNIMA

**Abstrak :** Revitalisasi kurikulum pada program pendidikan dan pengajaran dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai kelemahan baik dalam pendekatan maupun substansi. Berkenaan pula bahwa di lingkungan strategis program pendidikan telah terjadi perubahan-perubahan yang fundamental dan sangat ekstensif, dan realisasinya pada berbagai mata pelajaran, termasuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dilaksanakannya revitalisasi kurikulum berkenaan dengan apa yang direncanakan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya bahwa dengan adanya perencanaan yang cermat, maka lebih terjamin bahwa kurikulum pada setiap program pengajaran termasuk Pendidikan Kewarganegaraan dapat diwujudkan dan apa yang diajarkan dapat dikuasai dan dimiliki siswa, sekaligus dapat merupakan pengajaran yang berorientasi pada nilai moral dan budi pekerti. Orientasi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah pengajaran afektif, dan tidak dapat diajarkan dengan cara seperti mengajarkan tujuan kognitif taraf rendah untuk dihafal. Pengajaran afektif menuntut partisipasi aktif dari pihak siswa. Oleh sebab itu paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengajaran nilai, moral dan budi pekerti berupaya untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

**Kata kunci:** Pendidikan kewarganegaraan, Nilai Moral, Budi Pekerti

### PENDAHULUAN

Pendidikan dalam makna yang luas atau tatanan makro perlu dikembangkan dari sifat reaktif dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi rekonstruksionistik sosial. Maksudnya adalah pendidikan turut secara aktif memberikan corak dan arah terhadap perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk memiliki kemandirian serta menjangkau keunggulan, filosofi seperti ini perlu dijabarkan ke dalam strategi pendidikan yang visioner, lebih memberi nilai tambah yang bersifat strategis, serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Strategi pendidikan perlu dirancang agar mampu menjangkau alternatif jangka panjang yang mampu menghasilkan perubahan yang signifikan bagi masa depan bangsa, memupuk watak yang mandiri, serta tekad peserta didik untuk memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terhadap bangsa lain, (Eti Rochaety, dkk., 2008:30).

Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam dunia pendidikan tradisi untuk merancang dalam menjangkau strategi jangka panjang seperti dimaksudkan di atas, maka perlunya upaya untuk membentuk kualitas, dan harus mendapat prioritas. Berkenaan dengan itu dikatakan bahwa dalam strategi pendidikan nasional akan mencakup berbagai aspek sistem pendidikan secara nasional dengan landasan yang lebih utuh dan kokoh, yang harus saling menunjang satu dengan lainnya agar tujuan dapat tercapai. Salah satu aspek penting yang harus diprioritaskan adalah upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui upaya ini, maka dapat membangun kembali kemajemukan bangsa untuk memainkan peran secara maksimal melalui pengembangan pendidikan dan pengajaran.

Usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka pendidikan mengemban beberapa fungsi utama, anatar lain yaitu fungsi

transitif. Fungsi transistif yang dimaksudkan adalah menunjuk pada fungsi pendidikan dalam upaya memberikan nilai tambah melalui alih pengetahuan dan teknologi kepada siswa. Apalagi diperhadapkan pada kondisi perubahan social dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang demikian pesat, sehingga pendidikan dituntut untuk mampu menata dan mengemabangkan niali-nilai kehidupan baik secara individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, (Suparjo Adikusumo, 1990: 4 ).

Begitu pula mengenai kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Implementasinya pada semua mata pelajaran di sekolah mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekoah Menengah Atas, termasuk di dalamnya mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan.

Sehubungan dengan mata pelajaran PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dimplementasi sebagai pengajaran pendidikan nilai, moral dan budi pekerti yang diharapkan adalah dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras,

etnik, atau golongannya, dan hal ini merupakan Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998, ( Kurikulum PKn SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2006). Selain itu ditegaskan pula dalam kurikulum tersebut bahwa PKn memiliki komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

#### PENGERTIAN PENDIDIKAN NILAI, MORAL DAN BUDI PEKERTI

Pengertian Pendidikan Nilai

Rohmat Mulyana (2004:8) dalam bukunya "Pendidikan Nilai", menuliskan sebuah dari A Club of Rome (UNESCO, 1993), bahwa nilai diuraikan dalam dua gagasan yang saling berseberangan. Pada satu sisi nilai dibahas sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan dan harga. Sisi lainnya nilai digunakan untuk mewakili gagasan atau makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas. Nilai yang abstrak dan tak terukur itu antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian dan persamaan.

Sehubungan dengan itu, maka nilai menurut Gordon Allport (1964) dalam Mulyana Rohmat (2004:9) adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai dikatakan terjadi pada wilayah psikologi yang disebut keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, menyatakan bahwa keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologi yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan

kebutuhan. Karena itu keputusan benar-salah, baik - buruk, indah - tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya.

Sejalan dengan itu, maka Kuperman (1983) dalam Mulyana Rohmat (2004:9) menegaskan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Definisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia, dan salah satu bagian terpenting dalam proses pertimbangan nilai (value judgement) adalah pelibatan nilai-nilai normatif yang berlaku di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan pengertian nilai di atas, kemudian digabungkan dengan kata pendidikan, maka dua kata yakni pengertian pendidikan nilai memberi pengertian sebagai suatu pengembangan pribadi siswa tentang pola keyakinan yang terdapat dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Dalam nilai-nilai ini terdapat pembakuan tentang hal baik dan hal buruk serta pengaturan perilaku. Nilai-nilai hidup dalam masyarakat sangat banyak jumlahnya sehingga pendidika berusaha membantu untuk mengenali, memilih, dan menetapkan nilai-nilai tertentu sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan untuk berperilaku secara konsisten dan menjadi kebiasaan dalam hidup bermasyarakat, ( Jarolimex dalam Zuriyah Nurul, 2007:19).

#### Pengertian Pendidikan Moral

Pendidikan moral berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak itu berwujud moralitas atau kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat. Oleh karena menyangkut dua hal

yakni nilai-nilai dan kehidupan nyata, maka pendidikan moral lebih banyak membahas masalah dilema (seperti makan buah simalakama) yang berusaha untuk mengambil keputusan moral yang terbaik bagi diri dan masyarakatnya. Kemudian ditegaskan, bahwa sebenarnya para ahli filsafat dan ilmuwan berpikir spekulasi atau melakukan penelitian dalam bidang moral ini. Para Rasul Allah melalui Kitab Suci Taurat, Zabur, Injil, dan Alquran serta Sunah, telah mengajak umat manusia untuk meyakini dan melaksanakan isi kitab suci yang di dalamnya berisikan gudang moral. Nilai-nilai moral inilah kemudian dicanangkan kembali oleh para filsuf dan ahli ilmu pengetahuan yang dari generasi ke generasi terus diangkat dalam berbagai permasalahan cabang ilmu pengetahuan sosial humanities, dan ilmu pengetahuan lainnya, bahkan dalam menentukan ideologi.

Sejalan dengan itu ditegaskan lagi, bahwa apabila dihubungkan dengan negara sebagai organisasi puncak sangat berkepentingan untuk tumbuhnya publik cultu, yaitu perangkat kebudayaan yang bisa diterima oleh seluruh bangsa serta dapat digunakan untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, negara kita telah menetapkan pula suatu kawasan nilai-nilai budaya yaitu tujuan pendidikan nasional dan keseluruhan isi Pancasila, UUD 1945, GBHN, Propenas, dan serangkaian perundangan negara sebagai tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan moral.

#### Pengertian Budi Pekerti.

Pendidikan budi pekerti seperti dikemukakan Zuriyah Nurul adalah mengacu pada pengertian dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan sebagai moralitas implisit didalamnya beberapa pengertian yakni adat istiadat, sopan santu, dan perilaku. Namun pengertian budi pekerti secara hakiki adalah perilaku, dan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan dan kepribadian peserta didik. Budi pekerti



diri bangsa semakin melemah. Oleh sebab itu menurut Idrus Affandy harus dilakukan upaya-upaya untuk melembagakan dan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kepada seluruh jiwa bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan visi dan misi di atas, maka Pasandaran (2004:108) menegaskan kembangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam demokrasi merupakan suatu proses pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan dan memperkuat tumbuhnya masyarakat demokratis. Sejalan dengan itu, maka Benyamin Barber (1922) dalam pasandaran (2004) mengemukakan bahwa PKn yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. Kemampuan itu mencakup pengetahuan, keahlian dan karakter yang mampu menghormati keanekaragaman hak dan kepentingan sebagai implementasi dari menghormati hak asasi manusia.

Konsep Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Kata kewarganegaraan menurut Kalidjernih (2002:1), masih sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu situasi konteks tertentu dan terbatas, sehingga sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktifitas dalam suatu wilayah tertentu. Oleh sebab itu dewasa ini tidak jarang ditemukan pandangan orang bahwa warga negara yang baik hanya terbatas pada kewajibannya membayar pajak, mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebaliknya warga negara memiliki hak untuk mendapat dokumen legal, antara lain akte kelahiran, kartu tanda penduduk dan paspor yang dikeluarkan instansi pemerintah. Ternyata pemahaman ini secara jelas tidak memadai

karena hanya melihat status legal dari beberapa hak dan kewajiban seseorang warga negara secara parsial.

Sehubungan dengan pemaknaan kewarganegaraan yang dikemukakan di atas, maka merupakan suatu keharusan untuk merubah paradigma berpikir tentang kewarganegaraan dalam makna yang sebenarnya. Oleh sebab itu melalui upaya pendidikan formal harus dioptimalisasi dengan pengajaran yang mampu memberikan inovasi cara berpikir yang dimaksudkan, dan salah satu cara adalah meoptimalisasi kegiatan pendidikan pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Upaya pendidikan inilah dapat membentuk setiap warga negara bukan dengan memaknai secara parsial, tetapi dapat membentuk pribadi warga negara yang komprehensif dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pilar dalam membangun demokrasi bagi warga negara Indonesia, maka Dalam pembelajaran PKn perlu dibangun peserta didik dalam aspek civic knowledge yakni pengetahuan yang diperlukan, civic skills yakni kecakapan warga negara yang diperlukan baik kecakapan intelektual maupun partisipatoris, dan civic dispositions yakni watak atau karakter kewarganegaraan baik bersifat publik maupun privat seperti watak menghormati harkat dan martabat, memenuhi tanggung jawab, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, politik maupun pemerintahan, (Pasandaran, 2004:109).

Sehubungan dengan pemikiran di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKn dalam rangka "nation and character building", yakni: 1) PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai dan

perilaku demokrasi warganegara; 2) PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi para peserta didik. Pengembangan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warganegara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga negara (civic intelligence) sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi; 3) PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan pembelajaran yang interaktif yang dikemas dalam berbagai paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand of experience); 4) Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman sikap dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui 'mengajar demokrasi' (teaching democracy), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup secara demokrasi (doing democracy). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kedali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga lebih dapat berhasil dimasa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri siswa yang lebih berbasis kelas. (Pasandaran, 2004: 210).

#### Karakteristik Pembelajaran PKn

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ketika diajarkan di sekolah mencakup dimensi pengetahuan, dimensi nilai dan dimensi ketrampilan. Petunjuk teknis pengembangan silabus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Pendidikan Nasional menetapkan bahwa ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu

warga negara yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa, memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Pada gilirannya warga negara yang baik tersebut di harapkan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang demokratis konstitusional.

Cogan dalam Pasandaran (2004:73) menulis tentang dimensi-dimensi pendidikan kewarganegaraan bersifat multi dimensi yang mencakup: (1) The personal dimension yaitu kapasitas komitmen yang kuat terhadap nilai kehidupan bersama dalam suatu tatanan dunia yang saling interconnected dan interdependent; (2) The social dimension yaitu pengembangan keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam kehidupan bersama dalam seluruh aspek kehidupan; (3) The spatial dimension, mencakup kesadaran warga negara mengenai tantangan yang dihadapi yang melampaui batas-batas negara nasional dan memerlukan pemecahan masalah secara multinasional; (4) The temporal dimension mencakup kesadaran warga negara akan dimensi akan waktu yang lalu, kini dan masa depan.

Kapasitas yang dimaksudkan di atas dapat mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu: (1) Intellectual skill atau pengetahuan, (2) Life skill atau keterampilan hidup; dan (3) Participation skill atau disposisi. Ketiga elemen tersebut tidak berdiri sendiri tetapi beririsan satu terhadap yang lain yang akan membentuk kapasitas baru yaitu: Kompetensi, konfidensi, komitmen dan sebagai kapasitas utamanya adalah warga negara yang berwawasan dan berkemampuan mengambil keputusan secara nasional dan bertanggung jawab. (Quegley, 2000, dalam Pasandaran, 2004: 73-74).

Selanjutnya Pasandaran mengemukakan bahwa paradigma baru PKn ini menempatkan demokrasi sebagai karakteristik yang mendasar di dalam proses pendidikan kewarganegaraan dan hendaknya dilaksanakan melalui pengembangan daya nalar dan kecerdasan warga



negara (civic intelligence), sehingga menjadi warga negara yang cerdas dan kritis, pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab (civic responsibility), dan pengembangan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, politik maupun pemerintahan (civic participation). Oleh karena itu pengembangan program PKn kedepan harus didasarkan pada pengembangan dasar-dasar konsep yang kuat, dan sekaligus memberikan pengalaman kepada anak untuk mengalami dan memecahkan berbagai persoalan nyata di sekitar sekolah dan masyarakat atau masalah-masalah yang menjadi issue global umat manusia.

#### Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan

Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, dimana secara garis besar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan terdiri dari: (1) Dimensi pengetahuan kewarganegaraan yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah, dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik; (2) Dimensi keterampilan kewarganegaraan, yakni meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat yang madani, keterampilan mempengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama dan mengelola konflik; (3) Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan yang mencakup

percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individu, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas.

Selain itu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan menguraikan tentang beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yakni: (1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan warga negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan; (2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di dalam masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional; (3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional, dan internasional HAM, kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM; (4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara; (5) Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. hubungan dasar negara dengan konstitusi; (6) Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi; (7) Pancasila meliputi: kedudukan

pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka; dan (7) Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dengan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

#### PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI, MORAL DAN BUDI PEKERTI.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai mencakup kawasan moral dan budi pekerti. Maksudnya disini adalah budi pekerti merupakan buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral, dan moral bersumber pada kesadaran hidup yang bersumber pada alam pikiran. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang bebas merdeka, nilai dan moral manusia mempunyai kemerdekaan untuk memilih nilai dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah laku dalam hidup bersama dengan manusia lain. Nilai yang diambil adalah nilai tinggi, luhur, mulia, suci, dan jujur. Dengan demikian, mempelajari budi pekerti tidak lepas dari mempelajari nilai, norma dan moral, (BP-7 Pusat, 1995 dalam Pasandaran, 2004:127).

Selanjutnya dikemukakan bahwa nilai adalah suatu pengertian atau pensifatan yang digunakan untuk memberikan penghargaan terhadap barang atau benda. Manusia menganggap sesuatu bernilai, karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Dengan akal dan budinya manusia menilai dunia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kepuasan diri baik dalam arti memperoleh apa yang diperlukannya, apa yang menguntungkannya, atau apa yang menimbulkan kepuasan batinnya. Manusia sebagai subjek budaya, maka dengan cipta, rasa dan karsa, iman dan karyanya menghasilkan di dalam masyarakat bentuk-bentuk budaya yang membuktikan keberadaan

manusia dalam kebersamaan dan hal itu mengandung nilai.

Sehubungan dengan hal di atas, maka yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila adalah sesuatu yang dianggap baik oleh seluruh bangsa Indonesia sehingga sesuatu itu dijadikan pandangan hidup dan sebagai pola dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Idealnya setiap guru harus memiliki wawasan yang baik tentang nilai, norma dan moral, sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam pendidikan. Lebih-lebih bagi guru PKn, guru mata pelajaran yang oleh beberapa pihak dipandang sebagai representative pendidikan moral. Memang dalam rambu-rambu GBPP-PPKn kurikulum 1994 dinyatakan bahwa ruang lingkup PKn meliputi (1) nilai, moral dan norma, (2) kehidupan ideologi, politik, ekonomi social budaya, pertahanan keamanan, dan perkembangan iptek. Namun demikian ternyata apa yang tercantum dalam rambu-rambu ruang lingkup tersebut tidak disertai penjelasan apapun serta tidak pernah jelas dalam implementasi pembelajarannya.

Selanjutnya mengkaji pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral dan budi pekerti, dimana seperti yang dikemukakan oleh pasandaran (2004):129 yang mengemukakan bahwa apabila dilihat dari kata moral dalam Bahasa Indonesia disrtikan sebagai ahlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Maksudnya disini adalah bahwa pada hakekatnya moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas termasuk komunitas pelaksana pendidikan secara formal yakni sekolah. Kemudian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan pekerti, dalam implementasinya PKn sebagai pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan pendidikan budi pekerti. Sesuai dengan tujuan pendidikan budi pekerti yaitu penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri peserta didik dalam komunitas pendidikan secara

formal. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan sejarah perkembangan zaman, dimana sejak Kurikulum 1994 sampai sekarang mata pelajaran PKn dimaksudkan untuk menjawab kritik yang berkembang dimasyarakat bahwa hasil pembelajaran mata pelajaran PKn selama ini masih bersifat kognitif bahkan verbalistik. Untuk merespon kritik tersebut, pokok-pokok bahasan dalam mata pelajaran PKn kurikulum 1994 kemudian dirumuskan dalam topic-topik nilai (value), bukan topic-topik keilmuan, khususnya ilmu politik dan ilmu hukum. Sebagai contoh adalah topik nilai kepatuhan, bukan norma-norma dalam masyarakat atau lebih khusus norma hukum, dengan contoh lainnya adalah topik nilai musyawarah, bukan sistim demokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka keluhan umum dari para guru dalam menghadapi pokok bahasan/topic nilai dicontohkan tersebut merupakan konsep yang abstrak, tidak jelas body of knowledge-nya, serta sangat terbatasnya sumber bahan pembelajaran. Keluhan tersebut dapat dipahami, sebab topic-topik nilai tersebut sesungguhnya termasuk dalam kajian filsafat, khususnya filsafat nilai (aksiologi). Sedangkan dalam kajian tradisi persekolahan atau pendidikan formal kita, hingga tingkat perguruan tinggi sekalipun, kajian filsafat kurang memperoleh perhatian yang layak. Berbeda dengan sumber bahan untuk pengembangan topic-topik keilmuan, termasuk ilmu politik dan ilmu hukum, referensinya sangat banyak. Sehingga akibat dari permasalahan yang dikemukakan itu muncullah kondisi yang sangat ironis, yakni ketidak siapan guru dalam pembelajaran dan tidak mustahil terjadi kasus guru "kehabisan" bahan.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar. Tanpa

dimilikinya kompetensi itu, mustahil guru dapat melaksanakan perannya dengan baik yang pada giliran selanjutnya akan mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pendidikan. Standar kompetensi guru adalah criteria untuk menentukan kemampuan guru dalam membantu siswa dalam mencapai standar materi dan untuk kerja yang tinggi. Kriteria ini meliputi kemampuannya dalam menyiapkan program pembelajaran, mengkomunikasikan pengetahuannya, ketrampilan-ketrampilan peagogiknya, dan kemampuan dalam mengikuti perkembangan disiplin akademik dan professional. Secara ringkas kompetensi guru menyangkut dua aspek yakni kompetensi penguasaan bahan ajar dan kompetensi penguasaan pembelajaran.

Kompetensi penguasaan bahan ajar dalam PKn mencakup tiga aspek, yaitu: (1) memahami pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), (2) memahami ketrampilan kewarganegaraan (civic skills), dan (3) memahami etika kewarganegaraan (civic ethics). Aspek pengetahuan kewarganegaraan dan etika kewarganegaraan mencakup bahan ajar tentang nilai, moral dan norma. Disamping pula menguasai bahan ajar tersebut, guru hendaknya mampu mengimplementasikannya dalam program pembelajaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan dan analisis- analisis di atas, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: 1) Pendidikan Kewarganegaraan memiliki orientasi yakni sebagai pengajaran afektif, dan tidak dapat diajarkan dengan cara seperti mengajarkan tujuan kognitif taraf rendah untuk dihafal; 2) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diimplementasi sebagai pengajaran pendidikan nilai, moral dan budi pekerti dan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara

Kesatuan Republik Indonesia; 3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai mencakup kawasan moral dan budi pekerti yakni budi pekerti merupakan buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral, dan moral bersumber pada kesadaran hidup yang bersumber pada alam pikiran; 4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan moral lebih banyak membahas masalah dilema yang berusaha untuk mengambil keputusan moral yang terbaik bagi peserta didik ; 5) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan pekerti, kemudian dalam implementasinya sebagai pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan pendidikan budi pekerti; 5) Pendidikan budi pekerti yaitu penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri peserta didik pada suatu komunitas pendidikan secara formal yakni melalui pendidikan di sekolah-sekolah.

*Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, 2006., SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.,*

Mulyana Rohmat, 2004., *Mengaktualisasikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung.

Pasandaran Sj, 2004, *Demokratisasi Pendidikan, Menjawab Tantangan Manajemen Pendidikan Nasional*, Media Pustaka, Manado.

Rochaety Ety, Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti, 2008., *Sistim Informasi Manajemen Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Zuriah Nurul, 2007., *Pendidikan Moral dan Budi pekerti Dalam Perspektif Perubahan*, Bumi Aksara, Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adikusumo Soepardjo, 1990, *Perubahan Sosial dan Transformasi Pendidikan*, FPS IKIP Bandung.

Achmad Kosasih Djahiri, M. Asis Toyibin, 1992, *Pendidikan Pancasila II, Dirjen Dikti Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan*, Jakarta.

Idrus Affandy, 2013., *Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Kurikulum 3013, Prosiding, Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Implementasi Kurikulum 2013.*, Laboratorium PKn UPI Bandung.

Kalidjernih Freddy K., 2002., *Puspa Ragam, Konsep Dan Isu Kewarganegaraan, Edisi Kedua*, Widya Aksara Press, Jakarta.

Meyni, 1986, *Strategi Belajar Mengajar PMP, Universitas Terbuka*, Jakarta.